



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021**

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan nikmatNya sehingga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2021. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Renja Badan Keuangan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja berpedoman kepada Renstra Badan Keuangan dan RKPD Kabupaten Ngawi. Renja Badan Keuangan Tahun 2021 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2021 ini disadari masih terdapat kekurangan, namun seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna terwujudnya pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. BAMBANG SUPRIYADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19610105 198003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD.....	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Renja Perangkat Daerah	6
Gambar 2 SOTK Badan Keuangan.....	8
Gambar 3 Sistematika Renja.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	12
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	22
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	38
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan

penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).



Gambar 1. Renja Perangkat Daerah

Berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan rencana kerja 2021 Badan Keuangan adalah :

1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, dengan prioritas upaya penyelesaian terhadap target-target yang belum tercapai;
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa mendatang
3. Sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 pada tahapan RPJMD misi ke-5 yaitu Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja.

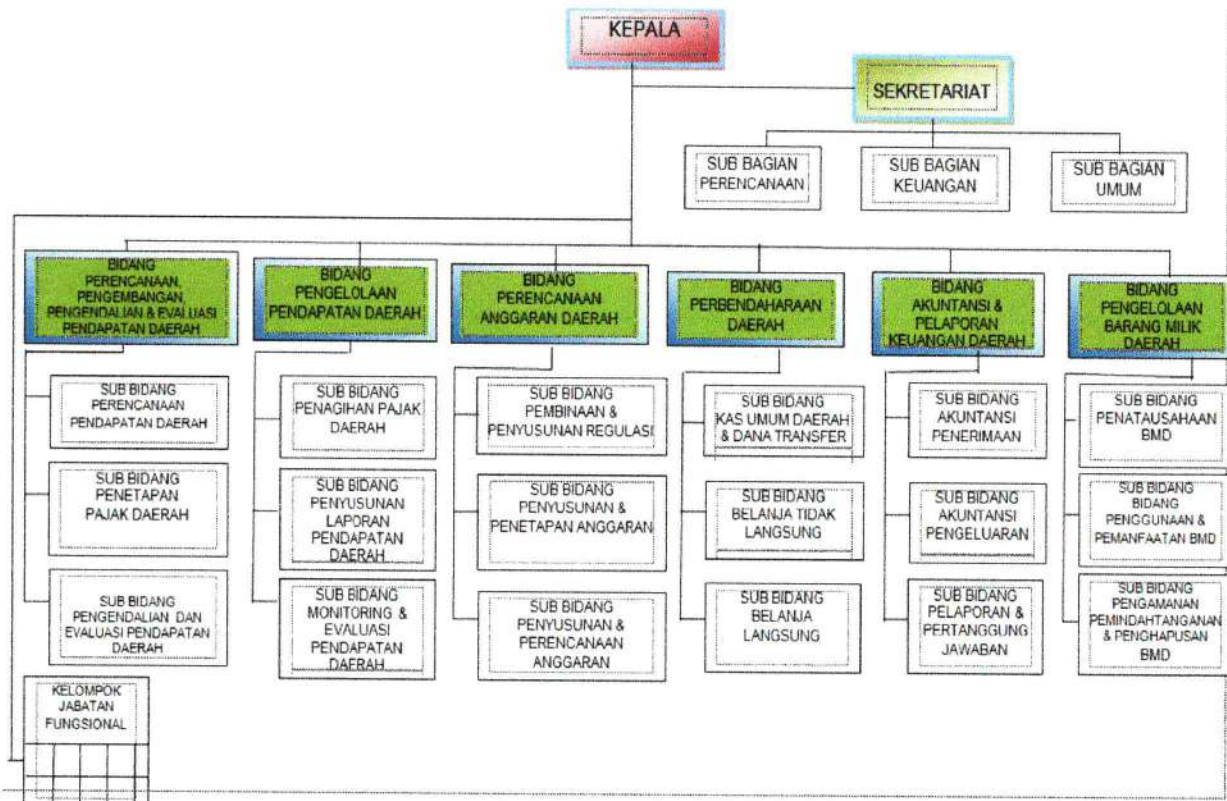
Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Keuangan yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. SOTK Badan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2021 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan.

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 adalah :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rancangan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar dibawah ini :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Gambar 3. Sistematika Penulisan Renja

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Strategis

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada Renja sebelumnya, hasil dari evaluasi dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan selanjutnya, bila evaluasi yang dilakukan menunjukkan substansi yang dirumuskan pada Renja tidak sesuai maka dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan yang diperlukan agar dihasilkan suatu perencanaan yang baik dan berkualitas tinggi dimana perencanaan tersebut akan tepat waktu, tepat jumlah (pendanaan) dan tepat sasaran dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah di analisis berdasarkan jenis indikator yang ditetapkan pada masing-masing program kegiatan sesuai tugas pokok fungsi. Kinerja Badan Keuangan secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dilihat di tabel 2.2.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, untuk itu Badan Keuangan harus mampu mengukur kinerja yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan didapat kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Capaian kinerja tahun 2019 **97,06%** dan mengalami peningkatan dibanding capaian kinerja tahun sebelumnya;
- ✓ Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Rp. 15.059.142.900,00 dan terealisasi Rp. 13.568.700.335,00 penyerapan sebesar **90,10 %**;
- ✓ Seluruh Capaian sesuai sasaran Renstra yaitu **kategori baik**.

2. Permasalahan dan Hambatan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang berkembang;

- b. Pengelolaan Keuangan Daerah secara sistem masih perlu pengembangan dan belum terintegrasi dalam upaya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah masih terkendala belum tertibnya penatausahaan BMD terutama dalam penyusunan laporan barang persediaan dan proses pensertifikatan tanah.
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- a. Berubahnya peraturan/regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan;
PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok fungsi Badan Keuangan dan Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan menuju *Single Codebase*. Hal ini menjadi isu penting dalam penyusunan Rencana Kerja selanjutnya;
 - b. Tindaklanjut dan Komitmen terhadap 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi serta kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK;
 - c. Tuntutan transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan dan BMD;
 - d. Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan;
 - e. Pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Daerah, Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan yang tertuang dalam Rancangan awal RKPD yaitu sejumlah 12 Program dan 47 Kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang urusan keuangan dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat. Namun demikian terkait dengan Badan Keuangan mengadministrasi pencairan untuk hibah dan bansos yang berupa uang berdasar rekomendasi dari OPD pengampu hibah bansos sesuai kewenangannya.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Renja Tahun (2017 s/d 2018)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan						
				4			5			6			7			8=7/6			9=5+7			10 = 5+7+9			Tingkat Realisasi Target Renstra
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	0 0 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang dikirim / terbitan	18.000 surat	63.900.000	3.946	18.318.501	4.000	8.800.000	4.000	2.372.500	26,96%	7.946	20.691.001	15.892	41.382.002	65%								
	0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman yang dikirim	35 Paket	0	-	0	10	0	10	0	0	10	0	0	-									
	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	96 Rekening	1.926.743.000	24	319.081.357	24	427.581.000	24	421.477.625	98,57%	48	740.558.982	96	1.481.117.964	77%								
	0 0 1		Jumlah rekening air yang dibayar	48 Rekening	0	36	0	12	0	12	0	0	48	0	96	-									
	0 0 1		Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	48 Rekening	0	12	0	12	0	12	0	0	24	0	48	-									
	0 0 1		Jumlah Rekening Internet yang dibayar	84 Rekening	0	12	0	6	0	24	0	0	36	0	72	-									
	0 0 1		Jumlah Jasa Sewa Housing/ Domain	40 bulan	0	12	0	12	0	12	0	0	24	0	48	-									
	0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	220 Unit	98.500.000	41	9.993.700	55	23.500.000	55	13.622.500	57,97%	96	23.616.200	192	47.232.400	48%								
	0 0 1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar	3.156 Kali	5.774.617.200	1.578	1.142.167.000	820	1.521.310.400	820	1.457.322.000	95,79%	2.398	2.598.489.000	4.796	5.198.978.000	90%								

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Lembar yang dibayarkan	168 Kali	0	40	480		480	480	0	0		520	1,040			
0 0 0 0 0 1 6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan atk	100 %	960.300.700	100	226.766.900		226.766.900	81	184.436.450	81,33%	181	453.844.640	362	907.689.280		93%
0 0 0 0 0 1 7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan	40.000 Lembar	527.141.000	8.012	75.000.000		75.000.000	20.000	72.330.900	96,44%	28.012	135.667.800	56.024	271.335.600		51%
		Jumlah Barang yang digandakan	96.000 Lembar	0	9.476	20.000		20.000	25.000	0		34.476	0	68.952			
0 0 0 0 0 1 8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	63.000.000	24	12.000.000		12.000.000	100	11.494.900	95,79%	124	19.982.600	248	39.965.200		63%
0 0 0 0 0 1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan	50 exsemplar	674.750.000	10	205.000.000		205.000.000	10	126.341.400	61,63%	20	142.866.400	40	285.732.800		42%
		Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan	36 buah	0	105	0		0	12	0		117	0	234			
		Jumlah Paket Iklan yang disediakan	300 Paket	0	200	0		0	10	0		210	0	420			
0 0 0 0 0 1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan	53.070 kotak	799.725.000	3.000	135.400.000		135.400.000	10.000	111.839.000	8,74%	13.000	228.890.400	26.000	457.780.800		57%
0 0 0 0 0 1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi keluar daerah yang diikuti atau dihadiri	875 kali	2.928.621.680	100	161.312.000		161.312.000	150	560.321.460	347,35%	250	993.552.550	500	1.987.105.100		68%
0 0 0 0 0 1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi kedalam daerah yang diikuti atau dihadiri	456 kali	317.428.000	182	82.510.000		82.510.000	100	62.868.000	76,19%	282	79.614.000	564	159.228.000		50%
2 0 0 0 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
0 0 0 0 0 2 3	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan/ beli	27 Unit	627.000.000	3	49.000.000		49.000.000	5	45.127.900	92,10%	8	77.676.900	16	155.353.800		25%
0 0 0 0 0 2 4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan dan dibeli	66 Unit	661.000.000	4	30.000.000		30.000.000	4	29.100.000	97,00%	8	180.696.500	16	361.393.000		55%

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=6+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0 0 0 0 2 6	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan	135 Unit	1.210.845.800	9	32.500.000	22	210.359.000	22	201.834.832	95,95%	31	234.334.832	62	468.669.664	39%	
0 0 0 0 2 010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	5.400 M2	323.562.000	463	129.151.000	600	72.854.000	600	65.425.677	89,80%	1063	194.576.677	2.126	389.153.354	120%	
0 0 0 0 2 011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	143 kali	284.800.000	54	39.349.525	21	70.100.000	21	62.782.995	89,56%	75	102.132.520	150	204.285.040	72%	
0 0 0 0 2 012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	160 Unit	97.000.000	80	75.000.000	40	20.000.000	40	17.059.000	85,30%	120	92.059.000	240	184.118.000	190%	
0 0 0 0 2 016	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	333 buah	898.070.000	114	60.889.255	90	274.979.600	90	248.489.400	90,37%	204	309.378.655	408	618.757.310	69%	
0 0 0 0 2 017	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	208 buah	121.240.000	36	18.494.800	56	27.080.000	56	20.270.300	74,85%	92	38.765.100	184	77.530.200	64%	
		Jumlah Perbayaran Jasa Kebersihan	312 kali	0	240		56		0	0		240	0	480	0		
		Jumlah Bahan Kebersihan yang dibeli	209 Jenis	0	45		56		53	0		98	0	196	0		
3 0 0 0 3	Program peningkatan disiplin aparatur																
0 0 0 0 3 4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan/ beli	844 potong	372.800.000	147	65.472.500	128	30.500.000	128	30.272.000	99,25%	275	95.744.500	550	191.489.000	51%	
		Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan	460 stel	211.300.000	0		128		0	0		0					
		Jumlah sepatu yang dibeli atau diadakan	105 Pasang	0	0		128		0	0		0					
4 0 0 0 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																
0 0 0 0 5 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal	195 orang	1.532.250.000	25	124.580.200	45	366.000.000	45	293.241.535	80,12%	70	417.821.735	140	835.643.470	55%	
		Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	6 Kali	0	0		4		4	0		4	0	8	0		

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0	85,9	0	100	0	100	0	185,9	0	372	0			
5	0	Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah															
0	0	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	40 dokumen	308.730.000	8	12.349.200	10	70.000.000	10	62.637.800	10	62.637.800	28	62.637.800	137.624.800	45%	
0	0	Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	68 laporan	0	12	0	10	0	11	0	11	0	34	-			
0	0	Jumlah Laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	60 laporan	282.074.000	24	112.829.600	15	6.750.000	15	6.735.000	15	6.735.000	54	6.735.000	126.299.600	45%	
6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA															
0	0	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	36 Kali	352.190.000	12	154.386.850	4	83.750.000	4	76.768.600	16	76.768.600	32	76.768.600	307.924.050	87%	
0	0	Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD yang difasilitasi	1.065 Desa	2.666.088.620	852	1.080.000.000	213	270.000.000	213	213.544.310	1065	1.293.544.310	2.130	2.587.088.620	97%		
		Jumlah sosialisasi yang diadakan	6 Kali	0	4	0	2	0	2	0	6	0	12				
4		URUSAN PENUNJANG LAINNYA															
4	2	KEUANGAN															

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=6+7		10 = 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	4 2 15	Program fasilitasi pemungutan dan pencatatan pendapatan daerah																
4	0 1 000 2 5 1	Ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah	16.920 Pajak	4.529.067.000	10.152	1.060.650.000	5.640	589.250.000	5470	468.417.000			15.622	1.529.067.000	31.244	3.058.134.000	68%	
		Jumlah Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	16.920 Kali	0	10.152		5.640		5.470	0			15.622	0	31.244	-		
		Jumlah laporan pelaksanaan hasil pendataan obyek pajak	3 Kali	0	3		3		3	0			6	0	12	-		
		Jumlah khurusus dan sosialisasi yang dilaksanakan	4.500 Surat	2.948.433.940	2.700	829.800.000	1.500	461.000.000	1500	452.127.800	98,08%		4.200	1.281.927.800	8.400	2.563.855.600	87%	
4	0 1 000 2 5 2	Fasilitasi Penagihan Pajak Daerah	600 surat	0	200		213		213	0			413	0	826	-		
		Jumlah Surat Hibauan yang diterbitkan	45 Kali	0	12		19		19	0			31	0	62	-		
		Jumlah Laporan hasil evaluasi penerimaan pajak daerah yang ditindaklanjuti	9 Unit	0	3		3		3	0			6	0	12	-		
		Jumlah Papan Reklame yang di adakan	834 Kali	547.456.800	498	164.412.000	278	91.340.000	278	84.432.000	92,44%		776	248.844.000	1.552	497.688.000	91%	
4	0 1 000 2 5 3	Pencatatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	36 Kali	0	12		12		12	0			24	0	48	-		
		Jumlah Monitoring dan evaluasi penerimaan PAD yang ditindaklanjuti	639 Laporan	822.141.760	426	158.136.000	213	231.780.000	213	215.564.800	93,00%		639	373.700.800	1278	747.401.600	91%	
		Jumlah Laporan PAD dan Dana bergulir yang disusun																
8	4 2 16	Program manajemen pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2)																
4	0 1 000 2 6 1	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	639 Laporan	822.141.760	426	158.136.000	213	231.780.000	213	215.564.800	93,00%		639	373.700.800	1278	747.401.600	91%	

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	0 1 000 2 6 2	Jumlah Desa yang yang dapat memenuhi Baku ketetapan PBB- P2	639 Desa	2.502.958.870	426	574.524.000	213	478.770.000	213	437.570.435	91,39%	639	1.012.094.435	1278	2.024.188.870	81%	
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 yang ditindaklanjuti	639 Kali	0	426	0	213	0	213	0		639	0	1278	-		
		Jumlah Pelaksanaan pengembangan Aplikasi Sistem on- line	6 Kali	0	2	0	2	0	2	0		4	0	8	-		
4	0 1 000 2 6 3	Jumlah pendataan Obyek dan Subyek PBB-P2 yang ditindaklanjuti	36.000 Obyek/Subyek	4.950.296.200	14.400	1.142.355.600	7.200	951.963.000	7.128	876.811.000	92,11%	21.528	2.019.166.600	43056	4.038.333.200	81%	
		Jumlah SPPT dan DHKP PBB-P2 yang diterbitkan	1.800 SPPT	0	720	0	360	0	323	0		1.043	0	2086	-		
		Jumlah Obyek Pajak yang dimutakhirkan	92.136 Obyek	0	36.854	0	18.427	0	18.388	0		55.222	0	110444	-		
9	4 2 17	Program penyusunan anggaran pemerintah daerah															
4	0 1 000 2 7 1	Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan 2 x 47	282 Kali	2.776.460.600	112	824.894.500	94	687.412.000	94	219.629.800	31,95%	206	1.044.524.300	412	2.089.048.600	75%	
		Jumlah Laporan Hasil Pembahasan SE yang ditindaklanjuti	12 Laporan	0	4	0	94	0	94	0		98	0	196	-		
		Jumlah distribusi Surat Edaran ke SKPD 2 x 47	282 Surat	0	112	0	94	0	94	0		206	0	412	-		
		Jumlah Laporan Pembahasan RKA- SKPD 2 x 47	282 Laporan	0	112	0	94	0	94	0		206	0	412	-		

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	0 1 000 2 7 2	Jumlah Dokumen Ranperda yang ditetapkan tepat waktu	6 Ranperda	8.861.741.592	2	2.350.000.000	2	2.087.530.000	2	1.678.064.360	80,39%	4	4.028.064.360	8	8.056.128.720	91%	
		Jumlah Dokumen Ranperbup yang ditetapkan tepat waktu	6 Ranperbup	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	8	-		
4	0 1 000 2 7 3	Jumlah Pembahasan Rencana Penyusunan Regulasi	12 Kali	2.231.493.515	2	720.840.000	4	300.350.000	4	293.475.234	97,71%	6	1.014.315.234	12	2.028.630.468	91%	
		Jumlah Regulasi yg ditetapkan	18 Surat	0	4	0	4	0	4	0	0	8	0	16	-		
		Jumlah Regulasi yg Didistribusi	18 Perbup	0	4	0	4	0	4	0	0	8	0	16	-		
10	4 2 18	Program penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD															
4	0 1 000 2 8 1	Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan 2 x 47	235 Kali	3.374.666.712	94	873.686.000	94	728.072.000	47	688.659.700	94,59%	141	1.562.345.700	282	3.124.691.400	93%	
		Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi laporan keuangan 47 opd x 12 bln	1.600 Kali	0	678	0	94	0	47	0	0	725	0	1450	-		
		Jumlah laporan realisasi anggaran semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang disusun tepat waktu	97 Laporan	0	2	0	94	0	47	0	0	49	0	98	-		
		Jumlah laporan realisasi anggaran bulanan yang ditindaklanjuti 47 opd x 12 bln	1.600 Kali	0	678	0	94	0	47	0	0	725	0	1450	-		
4	0 1 000 2 8 2	Jumlah Dokumen Ranperda yang ditetapkan tepat waktu	6 Dokumen	3.826.593.880	2	1.034.500.000	2	863.021.000	2	778.796.940	90,24%	4	1.813.296.940	8	3.626.593.880	95%	

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=6+7		10 = 5+7+9		11=10/4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah Dokumen Ranperbup yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	0	8	-	
4	0 1 000 2 8 3	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD	235 Kali	610.579.200	94	140.065.000	94	116.718.000	94	115.224.600	96,72%	188	255.289.600	376	510.579.200	84%		
		Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil moneyv 47 opd X 2	235 Kali	0	94	0	94	0	94	0	0	188	0	376	-			
11	4 2 19	Program penatausahaan keuangan pemerintah daerah																
4	0 1 000 2 9 1	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	1.185 Laporan	719.335.000	790	238.670.000	395	119.335.000	395	108.574.279	90,98%	1.185	347.244.279	2370	694.488.558	97%		
		Jumlah Rekonsiliasi iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti	33 Rekonsiliasi	0	22	0	11	0	11	0	0	33	0	66	-			
		Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditindaklanjuti PNS	33 Rekonsiliasi	0	22	0	11	0	11	0	0	33	0	66	-			
		Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang ditindaklanjuti	33 Rekonsiliasi	0	22	0	11	0	11	0	0	33	0	66	-			
		Jumlah Dokumen Laporan Gaji dan Tunjangan yang disampaikan ke DJPK	24 Dokumen	0	16	0	8	0	8	0	0	24	0	48	-			
		Jumlah Surat Penyelesaian Dana (SPD) yang diterbitkan	1.155 Surat	0	770	0	395	0	395	0	0	1.165	0	2330	-			
		Jumlah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan	1.155 Surat	0	385	0	395	0	395	0	0	780	0	1560	-			

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan	5.250 Surat	0	3.500	0	1750	0	1750	0	0	0	5.250	0	10500	-	
4	0 1 000 2 9 2	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Langsung	1.692 Kali	2.491.087.000	1.128	782.174.000	564	391.087.000	379.307.916	0	96,99%	1.692	1.161.481.916	3384	2.322.963.832	93%	
		Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	1.265 Surat	0	842	0	421	0	421	0		1.263	0	2526	-		
		Jumlah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	30.375 Surat	0	20.250	0	10125	0	10125	0		30.375	0	60750	-		
		Jumlah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan	5.400 Surat	0	3.600	0	1800	0	1800	0		5.400	0	10800	-		
4	0 1 000 2 9 3	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Kas Umum Daerah	594 Laporan	980.473.146	396	265.724.000	198	132.862.000	124.512.573	93,72%	594	390.236.573	1188	780.473.146	80%		
		Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu	144 Laporan	0	96	0	47	0	47	0		143	0	286	-		
		Jumlah Laporan Posisi kas SIKD Ke DJPK yang tepat waktu	24 Laporan	0	16	0	8	0	8	0		24	0	48	-		
		Jumlah Penyampaian Laporan DAK (fisik ,non Fisik) yang tepat waktu	96 Laporan	0	64	0	47	0	47	0		111	0	222	-		
		Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu	24 Laporan	0	16	0	8	0	8	0		24	0	48	-		
		Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu	24 Laporan	0	16	0	8	0	8	0		24	0	48	-		

1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=6+7		10 = 5+7+9		11=10/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Penyampaian Pesyairan Pencapaian BK Prop yang tepat waktu	3 Surat	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	6	-	
12	4 2 20	Program pengelolaan barang milik daerah															
4	0 2 000 2 0 1	Fasilitas Penatausahaan Pengelolaan BMD	235 Kali	3.083.940.348	94	881.800.000	94	440.900.000	410.170.174	94	410.170.174	93,03%	188	1.291.970.174	376	2.583.940.348	84%
		Jumlah rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	20 Kali	0	8	0	0	4	0	4	0		12	0	24	-	
		Jumlah dokumen BMD yang disusun tepat waktu dan up to date	60 Dokumen	0	24	0	0	12	0	12	0		36	0	72	-	
4	0 2 000 2 0 2	Fasilitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	235 SK	7.264.600.000	94	2.176.400.000	47	1.088.200.000	1.016.346.000	47	1.016.346.000	93,40%	141	3.192.746.000	282	6.385.492.000	88%
		Jumlah Berita Acara pemusnahan BMD yang diterbitkan	Berkas/ 10 Dokumen	0	4	0	0	2	0	2	0		6	0	12	-	
		Jumlah SK pengelola Barang terhadap penghapusan BMD yang diterbitkan	235 SK	0	94	0	0	47	0	47	0		141	0	282	-	
		Jumlah dokumen penilaian BMD disusun	235 Dokumen	0	94	0	0	47	0	47	0		141	0	282	-	
4	0 2 000 2 0 3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	235 Kali	2.903.355.280	94	878.000.000	47	439.000.000	423.677.640	47	423.677.640	96,51%	141	1.301.677.640	282	2.603.355.280	90%

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran dalam setahun	-	-	100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	100%		
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	93%	99%	100%	100%		
3	Persentase aparatur yang disiplin	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%		
5	Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD	-	-	100%	100%	100%	100%	80%	99%	100%	100%		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
6	Persentase penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional/ Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Penyusunan Laporan SKPD /PPKD	-	-	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik											
			Persentase OPD dengan tingkat Kesesuaian Pelaporan Keuangan terhadap Peraturan Perundangan, Kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
			Persentase Pajak Daerah, Realisasi Retribusi, Realisasi Dana Perimbangan Pertahun, Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
		-	Persentase tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan Rancangan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
		-	Persentase Jumlah Realisasi PBB - P2 per tahun	100%	100%	100%	100%	98%	-	-	-	
		-	Persentase Jumlah Kegiatan Pelayanan APBD / PAPBD Per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
		-	Persentase Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
		-	Persentase Tingkat Kualitas Pemungutan Pajak Daerah, Kategori Baik	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
		-	Persentase Pencapaian Target PBB-P2 yg ditetapkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
			Tingkat Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	
			Jumlah dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang disusun sesuai Regulasi dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Baik	-	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	UNSUB/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD	3	4	5	6	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		- 100,00	3.043.341.900	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		- 100,00	3.043.341.900
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim / terbitkan	Badan Keuangan	4600,00 surat	5.120.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim / terbitkan	Badan Keuangan	4600,00 surat	5.120.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Internet Yang dibayar Jumlah Jasa Sewa Hosting yang dibayar	Badan Keuangan	12,00 Rekening 12,00 Rekening 12,00 Rekening 10,00 Rekening 1 Paket	443.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Internet Yang dibayar Jumlah Jasa Sewa Hosting yang dibayar	Badan Keuangan	12,00 Rekening 12,00 Rekening 12,00 Rekening 10,00 Rekening 1 Paket	443.220.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	47,00 Unit	23.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	47,00 Unit	23.900.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar Jumlah Lembur yang dibayarkan	Badan Keuangan	725,00 Kali 19680,00 Kali	1.559.960.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar Jumlah Lembur yang dibayarkan	Badan Keuangan	725,00 Kali 19680,00 Kali	1.559.960.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan atk	Badan Keuangan	100,00 %	226.766.900	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan atk	Badan Keuangan	100,00 %	226.766.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan Jumlah Barang yang digandakan	Badan Keuangan	235415,00 Lembar 28027,00 Lembar	76.975.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan Jumlah Barang yang digandakan	Badan Keuangan	235415,00 Lembar 28027,00 Lembar	76.975.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Badan Keuangan	100,00 %	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Badan Keuangan	100,00 %	12.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan Jumlah Buku Peraturan Perundang yang disediakan Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	58,00 esemplar 20,00 buah 1,00 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan Jumlah Buku Peraturan Perundang yang disediakan Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	58,00 esemplar 20,00 buah 1,00 Paket	100.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan	Badan Keuangan	10000,00 kotak	135.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian Pegawai ,Rapat dan tamu yang disediakan	Badan Keuangan	10000,00 kotak	135.400.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	400.00 kali	425.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	400.00 kali	425.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	175.00 kali	35.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	175.00 kali	35.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		- 100,00	1.296.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		- 100,00	1.296.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit	600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit	600.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan/ beli	Badan Keuangan	6.00 Unit	49.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan/ beli	Badan Keuangan	6.00 Unit	49.000.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan dan dibeli	Badan Keuangan	20.00 Unit	35.000.000	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan dan dibeli	Badan Keuangan	20.00 Unit	35.000.000
	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan	Badan Keuangan	25.00 Unit	210.000.000	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan	Badan Keuangan	25.00 Unit	210.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah /luasan gedung kantor yang dipelihara Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	600.00 M2 1 Paket	150.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah /luasan gedung kantor yang dipelihara Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	600.00 M2 1 Paket	150.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar Jumlah Suku Cadang Yang Disediakan	Badan Keuangan	21.00 kali 2 Unit 1 Paket	62.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar Jumlah Suku Cadang Yang Disediakan	Badan Keuangan	21.00 kali 2 Unit 1 Paket	62.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Badan Keuangan	1.00 Paket	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Badan Keuangan	1.00 Paket	20.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kerja	Badan Keuangan	1	95.000.000	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kerja	Badan Keuangan	1	95.000.000
	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah Perbayaran Jasa Kebersihan Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	25.00 buah 576.00 kali 30.00 Jenis	75.000.000	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah Perbayaran Jasa Kebersihan Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	25.00 buah 576.00 kali 30.00 Jenis	75.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	- Persentase aparatur yang disiplin		- 100,00	145.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	- Persentase aparatur yang disiplin		- 100,00	145.000.000
	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan	Badan Keuangan	1.00 Unit	10.000.000	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan	Badan Keuangan	1.00 Unit	10.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	Badan Keuangan	100 Potong	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	Badan Keuangan	100 Potong	30.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan/ beli Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan Jumlah seputu yang dibeli atau diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan	Badan keuangan	100.00 potong 100.00 stel 100.00 Pasang 100 Potong	105.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan/ beli Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan Jumlah seputu yang dibeli atau diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan	Badan keuangan	100.00 potong 100.00 stel 100.00 Pasang 100 Potong	105.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	- Persentase sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Badan Keuangan	- 100,00	225.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	- Persentase sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya		- 100,00	225.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	75,00 orang 4,00 Kali 100,00 %	225.000.000		Jumlah Peserta diklat formal Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	75,00 orang 4,00 Kali 100,00 %	225.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD		- 100,00	71.500.000	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD		- 100,00	71.500.000
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12,00 dokumen 12,00 laporan	65.000.000		Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12,00 dokumen 12,00 laporan	65.000.000
	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12,00 laporan	6.500.000		Jumlah Laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12,00 laporan	6.500.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan SKPD/PPKD		- 100,00	325.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan SKPD/PPKD		- 100,00	325.000.000
	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4,00 Kali	95.000.000		Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	Badan keuangan	4,00 Kali	95.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD	Jumlah Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung PPKD yang difasilitasi Jumlah sosialisasi yang diadakan	Badan Keuangan	426,00 Desa 2,00 Kali	230.000.000		Jumlah Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung PPKD yang difasilitasi Jumlah sosialisasi yang diadakan	Badan Keuangan	426,00 Desa 2,00 Kali	230.000.000
	Keuangan				12.991.087.000	Keuangan				12.991.087.000
7	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	- Tingkat kualitas pelayanan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu		- 100,00	1.016.087.000	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	- Tingkat kualitas pelayanan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu		- 100,00	1.016.087.000

		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah	Jumlah laporan posisi kas harian yang Tepat Waktu Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu Jumlah Laporan Posisi kas SIKD Ke DJPK yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan DAK (fisik ,non Fisik) yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu BK Prop yang tepat waktu Jumlah rekonsiliasi BKU, SPJ Fungsional Jumlah rekonsiliasi posisi kas dengan Bank Jatim Jumlah rekonsiliasi DTH/RTH	Badan Keuangan	264.00 Laporan 48.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 4.00 Laporan 1.00 Surat 12.00 Kali 264.00 kali 12.00 Kali	150.000.000	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah	Jumlah laporan posisi kas harian yang Tepat Waktu Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu Jumlah Laporan Posisi kas SIKD Ke DJPK yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan DAK (fisik ,non Fisik) yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Persyaratan Pencairan BK Prop yang tepat waktu Jumlah rekonsiliasi BKU, SPJ Fungsional Jumlah rekonsiliasi posisi kas dengan Bank Jatim Jumlah rekonsiliasi DTH/RTH	Badan Keuangan	264.00 Laporan 48.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 4.00 Laporan 1.00 Surat 12.00 Kali 264.00 kali 12.00 Kali	150.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Laporan gaji dan tunjangan yang disampaikan Ke DJPK Jumlah surat Keterangan Pembayaran (SKPP) Yang diterbitkan Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 16.00 Kali 4.00 Kali 16.00 Kali 12.00 Dokumen 500.00 Surat 2000.00 Surat	204.000.000	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang Ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Laporan gaji dan tunjangan yang disampaikan Ke DJPK Jumlah surat Keterangan Pembayaran (SKPP) Yang diterbitkan Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 16.00 Kali 4.00 Kali 16.00 Kali 12.00 Dokumen 500.00 Surat 2000.00 Surat	204.000.000	

		Hasil Analisis Kebutuhan								
NO	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	Jumlah OPD yang memindaklanjuti hasil pembinaan penatausahaan 47 OPD x 12 Dana (SP2D) Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Jumlah Juknis dan Sisdur yang disusun	Badan Keuangan	4.00 Kali 11000.00 surat 611.00 Surat 1.00 Kali	662.087.000	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	Jumlah OPD yang memindaklanjuti hasil pembinaan penatausahaan 47 OPD x 12 Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Jumlah Juknis dan Sisdur yang disusun	Badan Keuangan	4.00 Kali 11000.00 surat 611.00 Surat 1.00 Kali	662.087.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib - Tingkat pengelolaan barang milik daerah kategori tertib		- 100,00 - 90,00	2.070.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib - Tingkat pengelolaan barang milik daerah kategori tertib		- 100,00 - 90,00	2.070.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD yang dicatat Jumlah laporan Hasil Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan Jumlah Laporan BMD yang disusun dan dihimpun Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah Bimtek Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah updating database BMD yang dihasilkan	Badan Keuangan	2.00 Laporan 5.00 Laporan 4.00 Kali 3.00 Laporan 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali	435.000.000	Kegiatan Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD yang dicatat Jumlah laporan Hasil Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan Jumlah Laporan BMD yang disusun dan dihimpun Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah Bimtek Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah updating database BMD yang dihasilkan	Badan Keuangan	2.00 Laporan 5.00 Laporan 4.00 Kali 3.00 Laporan 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali	435.000.000
	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan RKBMD Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD Jumlah laporan SK Penetapan Penggunaan yang disusun Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	47.00 Laporan 47.00 Laporan 47.00 Laporan 2.00 Dokumen	510.000.000	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan RKBMD Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD Jumlah laporan SK Penetapan Penggunaan yang disusun Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	47.00 Laporan 47.00 Laporan 47.00 Laporan 2.00 Dokumen	510.000.000

		Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Pengamanan, Pemindatanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan Penghapusan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4.00 Laporan 2.00 Dokumen 5.00 Dokumen 30.00 Dokumen	1.125.000.000	Kegiatan Pengamanan, Pemindatanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan Penghapusan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4.00 Laporan 2.00 Dokumen 5.00 Dokumen 30.00 Dokumen	1.125.000.000	
8	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kategori Baik		- 100.00	3.695.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kategori Baik		- 100.00	3.695.000.000	
	Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data pendapatan daerah yang akurat Jumlah dokumen naskah akademik Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah Jumlah dokumen integrasi dengan pihak ketiga	Badan Keuangan	281.00 Kali 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.00 Dokumen	700.000.000	Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data pendapatan daerah yang akurat Jumlah dokumen naskah akademik Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah Jumlah dokumen integrasi dengan pihak ketiga	Badan Keuangan	281.00 Kali 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.00 Dokumen	700.000.000	
	Fasilitasi penetapan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan Jumlah obyek pajak yang ditetapkan Jumlah DHKP yang diterbitkan Jumlah cetak sppt	Badan Keuangan	6600.00 wajib Pajak 615750.00 Obyek Pajak 90.00 Box 655000.00 lembar	2.000.000.000	Fasilitasi penetapan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan Jumlah obyek pajak yang ditetapkan Jumlah DHKP yang diterbitkan Jumlah cetak sppt	Badan Keuangan	6600.00 wajib Pajak 615750.00 Obyek Pajak 90.00 Box 655000.00 lembar	2.000.000.000	
	Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Jumlah monitoring pajak daerah dan pbb Jumlah bimtek dalam rangka peningkatan kualitas SIDM dan peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	12.00 Laporan 19.00 Kali 2.00 Kali	995.000.000	Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Jumlah monitoring pajak daerah dan pbb Jumlah bimtek dalam rangka peningkatan kualitas SIDM dan peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	12.00 Laporan 19.00 Kali 2.00 Kali	995.000.000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik		- 100.00	1.460.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik		- 100.00	1.460.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan SPPT yang ditagih Jumlah laporan SKPD yang ditagih Himbauan Yang diterbitkan Jumlah Surat keberatan, pengurangan dan banding Yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.00 Laporan 1.00 Surat	380.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan SPPT yang ditagih Jumlah laporan SKPD yang ditagih Jumlah laporan atas Surat Teguran dan Hibauan Yang diterbitkan Jumlah Surat keberatan, pengurangan dan banding Yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.00 Laporan 1.00 Surat	380.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan dana perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan lain-lain yang diperoleh daerah yang sah disusun akurat dan tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan	280.000.000	Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan dana perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan lain-lain yang diperoleh daerah yang sah disusun akurat dan tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan	280.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	19.00 Kali 19.00 Kali	800.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	19.00 Kali 19.00 Kali	800.000.000
10	PROGRAM MANAJEMEN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang Disusun Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu		- 100.00	2.750.000.000	PROGRAM MANAJEMEN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang Disusun Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu		- 100.00	2.750.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	Jumlah SK Bupati tentang Standar Satuan Harga Jumlah Standarisasi Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada masing2 kegiatan Jumlah Bimbingan Teknis Admin E-Budgeting Jumlah Pembinaan Teknis Pembinaan SKPD Jumlah Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD dan PAPBD Jumlah Pendampingan Aplikasi e-budgeting	Badan Keuangan	1.00 SK 1.00 SK 2.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali	750.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	Jumlah SK Bupati tentang Standar Satuan Harga Jumlah Standarisasi Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada masing2 kegiatan Jumlah Bimbingan Teknis Admin E-Budgeting Jumlah Pembinaan Teknis Pembinaan SKPD Jumlah Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD dan PAPBD Jumlah Pendampingan Aplikasi e-budgeting	Badan Keuangan	1.00 SK 1.00 SK 1.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali	750.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	Jumlah dokumen Perda APBD yang disusun Jumlah dokumen Perbu Penjabaran APBD dan PAPBD yang disusun	Badan Keuangan	2.00 Perda 2.00 Perbu	1.500.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	Jumlah dokumen Perda APBD dan PAPBD yang disusun Jumlah dokumen Perbu Penjabaran APBD dan PAPBD yang disusun	Badan Keuangan	2.00 Perda 2.00 Perbu	1.500.000.000
	Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ranperda APBD yang tersusun Jumlah Dokumen Ranperbu Penjabaran APBD dan PAPBD yang Tersusun	Badan Keuangan	2.00 Ranperda 2.00 Ranperbu	500.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan PAPBD yang tersusun Jumlah Dokumen Ranperbu Penjabaran APBD dan PAPBD yang Tersusun	Badan Keuangan	2.00 Ranperda 2.00 Ranperbu	500.000.000
11	PROGRAM MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Disusun Sesuai SAP dan Tepat Waktu		- 100.00	2.000.000.000	PROGRAM MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Disusun Sesuai SAP dan Tepat Waktu		- 100.00	2.000.000.000
	Kegiatan Fasilitas, Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi, verifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi penerimaan terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi tgg Akuntansi Penerimaan yang dihasilkan	Badan Keuangan	12.00 Kali 180.00 Kali 180.00 Kali 285.00 Laporan 180.00 Kali 12.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Dokumen	150.000.000	Kegiatan Fasilitas, Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi penerimaan terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi tgg Akuntansi Penerimaan yang dihasilkan	Badan Keuangan	12.00 Kali 180.00 Kali 180.00 Kali 285.00 Laporan 180.00 Kali 12.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Dokumen	150.000.000

Hasil Analisis Kebutuhan										
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Fasilitas Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi, dan pengukuran data transaksi Pengeluaran SKPD Jumlah konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya Jumlah ikhtisar laporan keuangan BUMD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Pengeluaran dengan SKPD Jumlah konsolidasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD, dan PPKD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi Jumlah verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi tlg Akuntansi Pengeluaran yang dihasilkan	Badan Keuangan	564.00 Kali 12.00 Kali 12.00 Laporan 1368.00 Kali 564.00 Kali 1368.00 Laporan 12.00 Kali 1368.00 Laporan 2.00 Kali 2.00 Dokumen	200.000.000	Kegiatan Fasilitas Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi, dan pengukuran data transaksi Pengeluaran SKPD Jumlah konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya Jumlah ikhtisar laporan keuangan BUMD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Pengeluaran dengan SKPD Jumlah konsolidasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD, dan PPKD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi Jumlah verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP Jumlah pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	564.00 Kali 12.00 Kali 12.00 Laporan 1368.00 Kali 564.00 Kali 1368.00 Laporan 12.00 Kali 1368.00 Laporan 2.00 Kali 2.00 Dokumen	200.000.000
	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	Jumlah kebijakan & Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	6.00 Dokumen 47.00 Laporan 47.00 Laporan	550.000.000	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	Jumlah Kebijakan & Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	6.00 Dokumen 47.00 Laporan 47.00 Laporan	550.000.000

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan								
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan Penyusunan ramperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ramperda & Ranperbup tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimtek tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD kedalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang disusun Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas memorial transaksi non kas Jumlah Pembinaan, Sosialisasi tentang Penyusunan keuangan Daerah sesuai SAP	Badan Keuangan	2.00 Dokumen 2.00 Kali 300.00 Laporan 300.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Dokumen 47.00 Kali 47.00 Kali	1.100.000.000	Kegiatan Penyusunan ramperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda & Ranperbup tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimtek tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD kedalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ikhtisar Kinerja Keuangan Daerah yang disusun Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas memorial transaksi non kas Jumlah Pembinaan, Sosialisasi tentang Penyusunan keuangan	Badan Keuangan	2.00 Dokumen 2.00 Kali 300.00 Laporan 300.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Dokumen 47.00 Kali 47.00 Kali	1.100.000.000

BAB III
TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. RPJMD propinsi Jawa Timur yang mengacu kepada RPJM Nasional menjadi pedoman penyusunan Renstra, RKPD dan Renja OPD. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dijabarkan dalam tabel berikut :

N O	RPJMN 2020-2024	RPJMD Jatim 2019-2024	RPJMD Kab. Ngawi	Rancangan RKPD Kab. Ngawi 2021
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah, melalui Penguatan Akses Pelayanan Dasar, Optimalisasi Pendapatan Daerah non APBD dan Peraturan Daerah yang Mendukung Inovasi	Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Parsipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan	Misi 5 : Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tabel 3.1 Keselarasan antar dokumen perencanaan

Berdasarkan tabel diatas, misi 5 dalam RPJMD Kabupaten Ngawi mendukung Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden RI yaitu Agenda 2 : Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Mengacu Pada **Visi** RPJMD Kabupaten Ngawi 2016-2021: “*Ngawi Sejahtera, Berakhlak Berbasis Pedesaan, Sebagai Barometer Jawa Timur*”, Badan Keuangan bertanggungjawab Mendukung **Misi Ke 5** yaitu *Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Serta Pelayanan Publik Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel Serta Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Melalui Peningkatan Kinerja*, sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran Renja sebagaimana berikut :

- Tujuan : “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan BMD”,
- Sasaran : “Persentase Pengelolaan Keuangan Dan BMD Kategori Baik”.

3.3 Program dan Kegiatan

Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program-program yang wajib dan strategis yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sejumlah 12 program.

Kegiatan

Kegiatan merupakan pelaksanaan dari Program yang telah ditetapkan yang merupakan pelaksanaan secara nyata dan dapat diaplikasikan dalam bentuk pencapaian tujuan, Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi di Tahun 2021 sejumlah 47 Kegiatan.

Tabel 3.3. Rencana Program & Kegiatan Tahun 2021

Tabel 3.3

Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.323.984.000	
	Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD				3.258.349.000	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		- 100,00	2.563.146.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim / terbitkan	Badan Keuangan	4600,00 surat	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Internet Yang dibayar Jumlah Jasa Sewa Hosting yang dibayar	Badan Keuangan	12.00 Rekening 12.00 Rekening 12.00 Rekening 10.00 Rekening 1 Paket	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	47.00 Unit	14.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar Jumlah Lembur yang dibayarkan	Badan Keuangan	725.00 Kali 19680.00 Kali	1.314.312.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan akk	Badan Keuangan	100.00 %	128.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan Jumlah Barang yang digandakan	Badan Keuangan	235415.00 Lembar 28027.00 Lembar	76.975.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Badan Keuangan	100.00 %	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	58.00 eksempplar 20.00 buah 1.00 Paket	47.057.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian Pegawai ,Rapat dan tamu yang disediakan	Badan Keuangan	10000.00 kotak	112.000.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi keluar daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	400.00 kali	425.000.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi kedalam daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	175.00 kali	30.802.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		- 100,00	231.380.000	Sekretariat
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan/ beli	Badan Keuangan	6.00 Unit	10.000.000	
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan dan dibeli	Badan Keuangan	20.00 Unit	6.000.000	
	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan	Badan Keuangan	25.00 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah /luasan gedung kantor yang dipelihara Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	600.00 M2 1 Paket	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar Jumlah Suku Cadang Yang Disediakan	Badan Keuangan	21.00 kali 2 Unit 1 Paket	62.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Badan Keuangan	1.00 Paket	17.300.000	

NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kerja	Badan Keuangan	1 paket	52.000.000	
	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	25.00 buah 576.00 kali 30.00 Jenis	24.080.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	- Persentase aparatur yang disiplin		- 100.00	92.840.000	Sekretariat
	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	Badan Keuangan	100 Potong	30.000.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan/ beli Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan Jumlah sepatu yang dibeli atau diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan	Badan keuangan	100.00 potong 100.00 stel 100.00 Pasang 100 Potong	62.840.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya		- 100.00	126.000.000	Sekretariat

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	75.00 orang 4.00 Kali 100.00 %	126.000.000	
5	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD		- 100.00	67.698.000	Sekretariat
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 dokumen 12.00 laporan	61.198.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 laporan	6.500.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan SKPD/PPKD		- 100.00	177.285.000	Sekretariat
	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	Badan keuangan	4.00 Kali	77.285.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD	Jumlah Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung PPKD yang difasilitasi Jumlah sosialisasi yang diadakan	Badan Keuangan	426.00 Desa 2.00 Kali	100.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Keuangan				7.065.635.000	
7	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah	- Tingkat kualitas pelayanan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu Jumlah laporan posisi kas harian yang Tepat Waktu Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu Jumlah Laporan Posisi kas SIKD Ke DJPK yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan DAK (fisik ,non Fisik) yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Persyaratan Pencairan BK Prop yang tepat waktu Jumlah rekonsiliasi BKU, SPJ Fungsional Jumlah rekonsiliasi posisi kas dengan Bank Jatim Jumlah rekonsiliasi DTH/RTH	Badan Keuangan	264.00 Laporan 48.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 4.00 Laporan 1.00 Surat 12.00 Kali 264.00 kali 12.00 Kali	491.087.000	Bidang Perbendaharaan Daerah
					150.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung	<p>Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah Rekonsiliasi iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kesehatan yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang Ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah Dokumen Laporan gaji dan tunjangan yang disampaikan Ke DJPK</p> <p>Jumlah surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Yang diterbitkan</p> <p>Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan</p>	Badan Keuangan	<p>12.00 Laporan</p> <p>16.00 Kali</p> <p>4.00 Kali</p> <p>16.00 Kali</p> <p>12.00 Dokumen</p> <p>500.00 Surat</p> <p>2000.00 Surat</p>	150.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	<p>Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan penatausahaan 47 OPD x 12</p> <p>Jumlah pemberian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p> <p>Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan</p> <p>Jumlah Juknis dan Sisdur yang disusun</p>	Badan Keuangan	<p>4.00 Kali</p> <p>11000.00 surat</p> <p>611.00 Surat</p> <p>1.00 Kali</p>	191.087.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<p>- Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib</p> <p>- Tingkat pengelolaan barang milik daerah kategori tertib</p>		<p>- 100.00</p> <p>- 90.00</p>	1.789.000.000	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan SPT yang ditagih Jumlah laporan SKPD yang ditagih Jumlah laporan atas Surat Teguran dan Himbauan Yang diterbitkan Jumlah Surat keberatan, pengurangan dan banding Yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.00 Laporan 1.00 Surat	350.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan dana perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun akurat dan tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan	250.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	19.00 Kali 19.00 Kali	400.000.000	
10	PROGRAM MANAJEMEN PERENCANA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang Disusun Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu	Badan Keuangan	- 100.00	1.345.048.000	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	Jumlah SK Bupati tentang Standar Satuan Harga Jumlah Standarisasi Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada masing2 kegiatan Jumlah Bimbingan Teknis Admin E-Budgeting Jumlah Pembinaan Teknis Pembinaan SKPD Jumlah Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD dan PAPBD Jumlah Pendampingan Aplikasi e-budgeting	Badan Keuangan	1.00 SK 1.00 SK 1.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali	436.048.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	Jumlah dokumen Perda APBD dan PAPBD yang disusun Jumlah dokumen Perbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang disusun	Badan Keuangan	2.00 Perda 2.00 Perbup	509.000.000	
	Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan PAPBD yang tersusun Jumlah Dokumen Ranperbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang Tersusun	Badan Keuangan	2.00 Ranperda 2.00 Ranperbup	400.000.000	
11	PROGRAM MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Disusun Sesuai SAP dan Tepat Waktu		- 100.00	1.190.500.000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Kegiatan Fasilitas, Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi penerimaan Jumlah Verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi ttg Akuntansi Penerimaan yang dihasilkan	Badan Keuangan	12.00 Kali 180.00 Kali 180.00 Kali 285.00 Laporan 180.00 Kali 12.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Dokumen	150.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Kegiatan Fasilitasi Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	<p>Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi Pengeluaran SKPD</p> <p>Jumlah konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya</p> <p>Jumlah ikhtisar laporan keuangan BUMD</p> <p>Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Pengeluaran dengan SKPD</p> <p>Jumlah konsolidasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD, dan PPKD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)</p> <p>Jumlah evaluasi laporan realisasi pengeluaran</p> <p>Jumlah verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran</p> <p>Jumlah pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP</p> <p>Jumlah Regulasi ttg Akuntansi Pengeluaran yang dihasilkan</p>	Badan Keuangan	<p>564.00 Kali</p> <p>12.00 Kali</p> <p>12.00 Laporan</p> <p>564.00 Kali</p> <p>1368.00 Laporan</p> <p>12.00 Kali</p> <p>1368.00 Laporan</p> <p>2.00 Kali</p> <p>2.00 Dokumen</p>	180.000.000	
	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	<p>Jumlah kebijakan & Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah</p> <p>Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p>	Badan Keuangan	<p>6.00 Dokumen</p> <p>47.00 Laporan</p> <p>47.00 Laporan</p>	310.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
	Kegiatan Penyusunan ranperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	<p>Jumlah Ranperda & Ranperbup tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu</p> <p>Jumlah Pelaksanaan BinteK tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p>Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD kedalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p>Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p> <p>Jumlah Ikhtisar Kinerja Keuangan Daerah yang disusun</p> <p>Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas memorial transaksi non kas</p> <p>Jumlah Pembinaan, Sosialisasi tentang Penyusunan keuangan Daerah sesuai SAP</p>	Badan Keuangan	<p>2.00 Dokumen</p> <p>2.00 Kali</p> <p>300.00 Laporan</p> <p>300.00 Laporan</p> <p>12.00 Laporan</p> <p>12.00 Dokumen</p> <p>47.00 Kali</p> <p>47.00 Kali</p>	550.500.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI Tahun Perencanaan : 2021												
Nama Organisasi												
(4.02.01) BADAN KEUANGAN												
Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			Asal Usulan	
				Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Jumlah Pagu		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4 02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					10.323.984.000			18.428.968.900			
4 02	Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD					3.258.349.000			5.081.881.900			
4 02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		- 100,00		2.563.146.000			3.043.381.900			
4 02	4.02.01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim / terbitkan	Badan Keuangan	4600,00 surat	APBD KAB	3.000.000	-	5000,00 surat	5.120.000			
4 02	4.02.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Internet Yang dibayar Jumlah Jasa Sewa Hosting yang dibayar	Badan Keuangan	12,00 Rekening 12,00 Rekening 10,00 Rekening 1 Paket	APBD KAB	400.000.000	-	12,00 Rekening 12,00 Rekening 10,00 Rekening 1 Paket	443.220.000			
4 02	4.02.01 01 004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	47,00 Unit	APBD KAB	14.000.000	-	50,00 Unit	23.900.000			
4 02	4.02.01 01 005 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar Jumlah Lembur yang dibayarkan	Badan Keuangan	725,00 Kali 19680,00 Kali	APBD KAB	1.314.312.000	-	852,00 Kali 1985,00 Kali	1.560.000.000			
4 02	4.02.01 01 006 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	Badan Keuangan	100,00 %	APBD KAB	128.000.000	-	100,00 %	226.766.900			
4 02	4.02.01 01 007 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan Jumlah Barang yang digandakan	Badan Keuangan	235415,00 Lembar 28027,00 Lembar	APBD KAB	76.975.000	-	235500,00 Lembar 28200,00 Lembar	76.975.000			
4 02	4.02.01 01 008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Badan Keuangan	100,00 %	APBD KAB	12.000.000	-	100,00 %	12.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4 02 4.02.01 01 009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	58.00 esemplar 20.00 buah 1.00 Paket	APBD KAB	47.057.000	60.00 esemplar 20.00 buah 10.00 Paket	100.000.000		
4 02 4.02.01 01 010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum untuk harian Pegawai ,Rapat dan tamu yang disediakan	Badan Keuangan	10000.00 kotak	APBD KAB	112.000.000	12000.00 kotak	135.400.000		
4 02 4.02.01 01 011	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi keluar daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	400.00 kali	APBD KAB	425.000.000	450.00 kali	425.000.000		
4 02 4.02.01 01 012	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi ke dalam daerah yang diikuti atau dihadiri	Badan Keuangan	175.00 kali	APBD KAB	30.802.000	180.00 kali	35.000.000		
4 02 4.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-	- 100.00	-	231.380.000	-	1.296.000.000		
4 02 4.02.01 02 002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit	APBD KAB	-	0.00 Unit	640.000.000		
4 02 4.02.01 02 003	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan/beli	Badan Keuangan	6.00 Unit	APBD KAB	10.000.000	5.00 Unit	49.000.000		
4 02 4.02.01 02 004	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan dan dibeli	Badan Keuangan	20.00 Unit	APBD KAB	6.000.000	10.00 Unit	35.000.000		
4 02 4.02.01 02 006	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan	Badan Keuangan	25.00 Unit	APBD KAB	10.000.000	22.00 Unit	2.10.000.000		
4 02 4.02.01 02 010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah /luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	600.00 M2 1 Paket	APBD KAB	50.000.000	600.00 M2 1 Paket	150.000.000		
4 02 4.02.01 02 011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar Jumlah Suku Cadang Yang Disediakan	Badan Keuangan	21.00 kali 2 Unit 1 Paket	APBD KAB	62.000.000	21.00 kali 2 Unit 1 Paket	62.000.000		
4 02 4.02.01 02 012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Badan Keuangan	1.00 Paket	APBD KAB	17.300.000	1.00 Paket	20.000.000		
4 02 4.02.01 02 016	Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kerja	Badan Keuangan	100 %	APBD KAB	52.000.000	100 %	95.000.000		
4 02 4.02.01 02 017	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah Perbaikan Jasa Kebersihan Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	25.00 buah 576.00 kali 30.00 Jenis	APBD KAB	24.080.000	30.00 buah 576.00 kali 35.00 Jenis	75.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
4 02 4.02.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	- Persentase aparatur yang disiplin		- 100.00	92.840.000			145.000.000	
4 02 4.02.01 03 001	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan	Badan Keuangan	2.00 Unit	APBD KAB	-	1.00 Unit	10.000.000	
4 02 4.02.01 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	Badan Keuangan	100 Potong	APBD KAB	-	100 Potong	30.000.000	
4 02 4.02.01 03 004	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan/ beli Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan Jumlah sepatu yang dibeli atau diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan	Badan keuangan	100.00 potong 100.00 stel 100.00 Pasang 100 Potong	APBD KAB	-	110.00 potong 110.00 stel 110.00 Pasang 110 Potong	105.000.000	
4 02 4.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	- Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya		- 100.00	126.000.000			225.000.000	
4 02 4.02.01 05 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal yang diadakan Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	75.00 orang 4.00 Kali 100.00 %	APBD KAB	-	45.00 orang 6.00 Kali 100.00 %	225.000.000	
4 02 4.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	- Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD		- 100.00	67.698.000			77.500.000	
4 02 4.02.01 05 001	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 dokumen 12.00 laporan	APBD KAB	-	12.00 dokumen 12.00 laporan	71.000.000	
4 02 4.02.01 05 006	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Jumlah Laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 laporan	APBD KAB	-	12.00 laporan	6.500.000	
4 02 4.02.01 08	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	- Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan SKPD/PPKD		- 100.00	177.285.000			295.000.000	
4 02 4.02.01 08 001	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	Badan keuangan	4.00 Kali	APBD KAB	-	4.00 Kali	95.000.000	
4 02 4.02.01 08 005	Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD	Jumlah Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung PPKD yang difasilitasi Jumlah sosialisasi yang diadakan	Badan Keuangan	426.00 Desa 2.00 Kali	APBD KAB	-	473.00 Desa 2.00 Kali	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	Asal Usulan	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
					Sumber Dana				Jumlah Pagu
4 02	Keuangan					13.347.087.000			
4 02 01	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	- Tingkat kualitas pelayanan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu	- 100.00	7.065.635.000 491.087.000		1.016.087.000			
4 02 01 004	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah	Jumlah laporan posisi kas harian yang Tepat Waktu Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu Jumlah Laporan Posisi Kas SIKD Ke DJPK yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan DAK (fisik .non Fisik) yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu Jumlah Penyampaian Persyaratan Pencairan BK Prop yang tepat waktu Jumlah rekonsiliasi BKU, SPJ Fungsional Jumlah rekonsiliasi posisi kas dengan Bank Jatim Jumlah rekonsiliasi DTH/RTH	264.00 Laporan 48.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 4.00 Laporan 1.00 Surat 12.00 Kali 264.00 kali 12.00 Kali	APBD KAB	150.000.000	150.000.000	264.00 Laporan 48.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan 4.00 Laporan 1.00 Surat 12.00 Kali 264.00 kali 12.00 Kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	Asal Usulan
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana	Jumlah Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			
4 02	Kegiatan Fasilitas pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian yang ditindaklanjuti Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Laporan gaji dan tunjangan yang disampaikan Ke DJPK Jumlah surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Yang diterbitkan Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 16.00 Kali 4.00 Kali 16.00 Kali 12.00 Dokumen 500.00 Surat 2000.00 Surat	APBD KAB	150.000.000	-	12.00 Laporan 16.00 Kali 4.00 Kali 16.00 Kali 12.00 Dokumen 500.00 Surat 2000.00 Surat	204.000.000	
4 02	Kegiatan Fasilitas pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan penatausahaan 47 OPD x 12 Jumlah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jumlah Surat Peryediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Jumlah Juknis dan Siscur yang disusun	Badan Keuangan	4.00 Kali 11000.00 surat 611.00 Surat 1.00 Kali	APBD KAB	191.087.000	-	4.00 Kali 11000.00 surat 611.00 Surat 1.00 Kali	662.087.000	
4 02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib - Tingkat pengelolaan barang milik daerah kategori tertib		- 100,00 - 90,00		1.789.000.000			2.076.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Asal Usulan
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Pagu	Target Capaian Kinerja			
4 02 4.02.01 20 004	Kegiatan Fasilitas Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD yang dicatat Jumlah laporan Hasil Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan Jumlah Laporan BMD yang disusun dan dihimpun Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah Bimtek Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah updating database BMD yang dihasilkan	Badan Keuangan	2.00 Laporan 5.00 Laporan 4.00 Kali 3.00 Laporan 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali	APBD KAB	350.000.000	-	2.00 Laporan 5.00 Laporan 4.00 Kali 3.00 Laporan 1.00 Kali 1.00 Kali 1.00 Kali	435.000.000	
4 02 4.02.01 20 005	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan RKBM Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD Jumlah laporan SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	47.00 Laporan 47.00 Laporan 47.00 Laporan 2.00 Dokumen	APBD KAB	439.000.000	-	47.00 Laporan 47.00 Laporan 47.00 Laporan 2.00 Dokumen	516.000.000	
4 02 4.02.01 20 006	Kegiatan Pengamanan, Pemdatangan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan Penghapusan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4.00 Laporan 2.00 Dokumen 5.00 Dokumen 30.00 Dokumen	APBD KAB	1.000.000.000	-	4.00 Laporan 2.00 Dokumen 5.00 Dokumen 30.00 Dokumen	1.125.000.000	
4 02 4.02.01 21	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kategori Baik		- 100.00		1.250.000.000			3.695.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
				Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
4 02 4.02.01 21 001	Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data pendapatan daerah yang akurat Jumlah dokumen naskah akademik Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah Jumlah dokumen integrasi dengan pihak ketiga	Badan Keuangan	281.00 Kali 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.00 Dokumen	APBD KAB	400.000.000	-	281.00 Kali 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 3.00 Dokumen	700.000.000	
4 02 4.02.01 21 002	Fasilitasi penetapan pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan Jumlah obyekt pajak yang ditetapkan Jumlah DHKP yang diterbitkan Jumlah cetak sppt	Badan Keuangan	6600.00 wajib Pajak 615750.00 Obyekt Pajak 90.00 Box 6550000.00 lembar	APBD KAB	400.000.000	-	6600.00 wajib Pajak 615750.00 Obyekt Pajak 90.00 Box 6550000.00 lembar	2.000.000.000	
4 02 4.02.01 21 003	Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Jumlah monitoring pajak daerah dan pbb Jumlah bimtek dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	12.00 Laporan 19.00 Kali 2.00 Kali	APBD KAB	450.000.000	-	12.00 Laporan 19.00 Kali 2.00 Kali	995.000.000	
4 02 4.02.01 22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik		- 100.00		1.000.000.000			1.460.000.000	
4 02 4.02.01 22 001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan SPPT yang ditagih Jumlah laporan SKPD yang ditagih Jumlah laporan atas Surat Teguran dan Himpauan Yang diterbitkan Jumlah Surat keberatan, pengurangan dan banding Yang diterbitkan	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.00 Laporan 1.00 Surat	APBD KAB	350.000.000	-	12.00 Laporan 12.00 Laporan 30.00 Laporan 1.00 Surat	380.000.000	
4 02 4.02.01 22 002	Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan dana perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu Jumlah laporan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun akurat dan tepat waktu	Badan Keuangan	12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan	APBD KAB	250.000.000	-	12.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Laporan	280.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
				Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4 02	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	19.00 Kali 19.00 Kali	APBD KAB	400.000.000	-	19.00 Kali 19.00 Kali	800.000.000	
4 02	PROGRAM MANAJEMEN PERENCANAAN/ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang Disusun Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu		- 100,00		1.345.048.000			3.000.000.000	
4 02	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	Jumlah SK Bupati tentang Standar Satuan Harga Jumlah Standarisasi Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada masing2 kegiatan Jumlah Bimbingan Teknis Admin E-Budgeting Jumlah Pembinaan Teknis Pembinaan SKPD Jumlah Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD dan PAPBD Jumlah Pendampingan Aplikasi e-budgeting	Badan Keuangan	1.00 SK 1.00 SK 1.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali	APBD KAB	436.048.000	-	1.00 SK 1.00 SK 1.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Kali	750.000.000	
4 02	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	Jumlah dokumen Perda APBD dan PAPBD yang disusun Jumlah dokumen Perbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang disusun	Badan Keuangan	2.00 Perda 2.00 Perbup	APBD KAB	509.000.000	-	2.00 Perda 2.00 Perbup	1.750.000.000	
4 02	Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan PAPBD yang tersusun Jumlah Dokumen Ranperbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang Tersusun	Badan Keuangan	2.00 Ranperda 2.00 Ranperbup	APBD KAB	400.000.000	-	2.00 Ranperda 2.00 Ranperbup	500.000.000	
4 02	PROGRAM MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Disusun Sesuai SAP dan Tepat Waktu		- 100,00		1.190.500.000			2.100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
4 4.02 4.02.01 24 001	Kegiatan Fasilitas, Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD Jumlah laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi penerimaan Jumlah Verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan Jumlah pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi tlg Akuntansi Penerimaan yang dihasilkan	Badan Keuangan	12.00 Kali 180.00 Kali 180.00 Kali 285.00 Laporan 180.00 Kali 12.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Dokumen	APBD KAB 150.000.000	-	12.00 Kali 180.00 Kali 180.00 Kali 285.00 Laporan 180.00 Kali 12.00 Kali 2.00 Kali 2.00 Dokumen	150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Rencana Tahun 2022		Asal Usulan	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Jumlah Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 02 4.02.01 24 002	Kegiatan Fasilitasi Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transeksi Pengeluaran SKPD Jumlah konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya Jumlah ikhtisar laporan keuangan BUMD Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Pengeluaran dengan SKPD Jumlah konsolidasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD, dan PPKD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Jumlah evaluasi laporan realisasi pengeluaran Jumlah verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran Jumlah pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP Jumlah Regulasi ttg Akuntansi	Badan Keuangan	564.00 Kali 12.00 Kali 12.00 Laporan 564.00 Kali 1368.00 Laporan 12.00 Kali 1368.00 Laporan 2.00 Kali 2.00 Dokumen	APBD KAB	180.000.000	-	564.00 Kali 12.00 Kali 12.00 Laporan 564.00 Kali 1368.00 Laporan 12.00 Kali 1368.00 Laporan 2.00 Kali 2.00 Dokumen	200.000.000	
4 02 4.02.01 24 003	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	Jumlah kebijakan & Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	6.00 Dokumen 47.00 Laporan 47.00 Laporan	APBD KAB	310.000.000	-	6.00 Dokumen 47.00 Laporan 47.00 Laporan	550.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Jumlah Pagu	Target Capaian Kinerja	
4 4.02 4.02.01 24 004	Kegiatan Penyusunan ranperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda & Ranperbup tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimtek tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD kedalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Ikhtisar Kinerja Keuangan Daerah yang disusun Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas memorial transaksi non kas Jumlah Pembinaan, Sosialisasi tentang Penyusunan keuangan Daerah sesuai SAP	Badan Keuangan	2.00 Dokumen 2.00 Kali 300.00 Laporan 300.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Dokumen 47.00 Kali 47.00 Kali	-	2.00 Dokumen 2.00 Kali 300.00 Laporan 300.00 Laporan 12.00 Laporan 12.00 Dokumen 47.00 Kali 47.00 Kali	1.200.000.000	
Jumlah total : (12 program 47 kegiatan)					10.323.984.000		18.428.968.900	

Ngawi, 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN

Drs. BAMBANG SUPRIYADI, M.Si
NIP. 19610 05 198003 1 004

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Ngawi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. BAMBANG SUPRIYADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19610105 198003 1 004

RENSITRA/RENSIA PD												PEMENDAGRI 90/2019			
STRUKTUR ORGANISASI	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 1.008			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	%	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 12
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 1.009			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	58	Eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 15
					Jumlah Buku Perundang-undangan yang disediakan	20	Buah		Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan						
					Jumlah Paket Iklan yang disediakan	1	Paket		Jumlah Paket Iklan yang disediakan						
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 1.010			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	10000	Korak	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan yang di sediakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 17
Sub Bagian Keuangan	4.02.4.02.01.0 1.011			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/dikuti	400	kali	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/dikuti	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 18
Sub Bagian Keuangan	4.02.4.02.01.0 1.012			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri/dikuti	175	kali	TIDAK ADA SUB KEGIATAN YANG SESUAI							
SEKRETARIAT	4.02.4.02.01.0 2			PROGRAM Peningkatan SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	94 %	%								
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.002			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan	2	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 20
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.003			Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan gedung kantor yang disediakan	6	Unit	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 22
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.004			Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	20	Unit	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 25
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.006			Pengadaan Peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	25	Unit	Pengadaan Peralatan dan perengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 13
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.010			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	600	m2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 28
					Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	1	Paket		Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan						
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.010			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	20	kali	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan Mobil dinas / operasional (unit kendaraan / jml pemeliharaan)	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX 01 2.03 30
					Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar	2	Unit		Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang Terbayar						

PERMENDAGRI 90/2019															
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENIA PD														
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.012			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Suku Cadang Yang Duedulakan	1 Pasat	Pasat	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Suku Cadang Yang Duedulakan	1 Pasat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.03 32
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.016			Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kerja	100 %	%	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (jml unit x jml pemeliharaan)	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.03 34
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 2.017			Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	25 Buah	Buah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Dalam Setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.03 08
					Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	30 Buah	Buah		Jumlah bahan kebersihan yang dibeli						
					Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	576 Kali	Kali		Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan						
SEKRETARIAT	4.02.4.02.01.0 3			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang disiplin	100 %	%								
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 3.001			Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin / kartu absensi yang diadakan	2 Unit	Unit	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli/diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.0 01 4
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 3.002			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang dibeli/diadakan	100 Porong	Porong	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek/ sosialisasi/ diklat dalam setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.0 02 4
Sub Bagian Umum	4.02.4.02.01.0 3.004			Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang dibeli/diadakan	100 Porong	Porong	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang dibeli/diadakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek/ sosialisasi/ diklat dalam setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.0 05 4
					Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan	100 Porong	Porong		Jumlah Pakaian Korpri yang di beli / diadakan		Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek/ sosialisasi/ diklat dalam setahun				
					Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan	100 Stel	Stel		Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan						
					Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	100 Pasang	Pasang		Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan						
SEKRETARIAT	4.02.4.02.01.0 5			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	100 %	%								
Sub Bagian Keuangan	4.02.4.02.01.0 5			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal	75 Orang	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta diklat formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			X XX 01 2.0 09 4

PERMENDAGRI 90/2019																	
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD																
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	
					Jumlah Dilhat dan pelatihan yang diadakan	4 kali		Jumlah Ditet dan pelatihan yang diadakan				Persentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui bimtek/ sosialisasi/ diklat dalam setahun					
Sub Bagian Keuangan					Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	100 %		Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu									
SEKRETARIAT	4.02.4.02.01.06			PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEANGKATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD dan SKPKD	100 %											
Sub Bagian Perencanaan	4.02.4.02.01.06.001			Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			X XX 01 2.0 04 1	
Sub Bagian Perencanaan					Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun Tepat waktu	12 Laporan		Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun									
Sub Bagian Perencanaan					Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			X XX 01 2.0 05 1	
Sub Bagian Keuangan	4.02.4.02.01.06.006			Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun			X XX 01 2.02 04	
Sub Bagian Keuangan					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Dokumen Pengaluan Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun			X XX 01 2.02 01	
Sub Bagian Keuangan					Monitoring dan Evaluasi Duk Infrastruktur Berbasis Web			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan									
Sub Bagian Keuangan					Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun			X XX 01 2.02 07	
SEKRETARIAT	4.02.4.02.01.08			PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan SKPD/PPKD	100 %											
Sub Bagian Perencanaan	4.02.4.02.01.08.001			Monitoring dan Evaluasi Duk Infrastruktur Berbasis Web	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	4 Kali		TIDAK ADA SUB KEGIATAN YANG SESUAI									
Sub Bagian Keuangan	4.02.4.02.01.08.005			Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD yang difasilitasi	Jumlah Pengelolaan anggaran belanja tidak langsung PPKD yang difasilitasi	426 Desa	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan khusus	Jumlah Laporan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan khusus				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD			5 02 02 2.0 03 4	

PERMENDAGRI 90/2019																	
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD						REKAM										
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	
									Jumlah desa yang mendapatkan Dana Desa Bantuan APBN								
									Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Sapias pedesaan								
									Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT								
									Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW								
									Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MATRA								
									Jumlah perangat desa yang difasilitasi luran jaminan kesehatannya								
									Jumlah kejadian luar biasa/bencana tidak terduga yang difasilitasi								
									Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah								
									Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah								
									Jumlah retribusi yang dikenal dana bagi hasil kepada provinsi								
									Jumlah retribusi yang dikenal dana bagi hasil kepada Polres								
	4.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Keuangan											KELUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5 02	
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	4.02.4.02.01.19			PROGRAM PEMATAUSAHUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat kualitas pelayanan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu	100 %											
Sub Bidang Kas Umum Daerah & Dana Transfer	4.02.4.02.01.19.004			Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah	Jumlah laporan posisi kas harian yang tepat Waktu	264 Laporan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Deposito	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD			5 02 02 2.0 01 2	
					Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu	48 Laporan	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Peleaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu							5 02 02 2.0 06 2
					Jumlah Laporan Posisi Kas SKD Ke DIPK yang tepat waktu	12 Laporan											
					Jumlah Penyempalan Laporan DAK (fisik-non Fisik) yang tepat waktu	12 Laporan											

STRUKTUR ORGANISASI	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
					Jumlah Penyampaian Laporan Daftar Rekap Transaksi Harian yang tepat waktu	12 Laporan	Laporan	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan koordinasi Dana Transfer & LKT (laporan konfirmasi transfer)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 05 2
					Jumlah Penyampaian Laporan Lembar Konfirmasi Transfer yang tepat waktu	4 Laporan	Laporan								
					Jumlah Penyampaian Persyaratan Pencairan BK Prop yang tepat waktu	1 Surat	Surat								
					Jumlah rekonsiliasi BKU SPJ Fungsional	12 Kali	Kali	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah rekonsiliasi Posisi kas dengan Bank Jatim, DTH/RTH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Rekonsiliasi yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 08 2
					Jumlah rekonsiliasi posisi kas dengan Bank Jatim	264 Kali	Kali		Jumlah Rekonsiliasi BKU						
					Jumlah rekonsiliasi DTH/RTH	12 Kali	Kali		Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional						
Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	4.02.4.02.01.1 9.005				Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti	12 Laporan	Laporan	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pembelian, Penganggaran, Rincian Pengeluaran Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Pembinaan SKPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan belanja yang sesuai	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 05 2
					Jumlah Rekonsiliasi Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti	15 Kali	Kali		Jumlah SPM yang diteliti		Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan				
					Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian yang ditindaklanjuti	4 Kali	Kali		Jumlah Rekonsiliasi Gaji						
					Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang ditindaklanjuti	16 Kali	Kali		Jumlah Laporan Gaji						
					Jumlah Dokumen Laporan gaji dan tunjangan yang disampaikan ke DJPK	12 Dokumen	Dokumen		Jumlah SKPD yang diterbitkan						
					Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan	2000 Surat	Surat	Pemrosesan, Penelitian dan Penyelesaian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 04 2
Sub Bidang Belanja Langsung	4.02.4.02.01.1 9.006				Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan penatausahaan	4 Kali	Kali	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pembelian, Penganggaran, Rincian Pengeluaran Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Pembinaan SKPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan belanja yang sesuai				5 02 02 2,0 05 2
					Jumlah Fasilitas pelaksanaan penatausahaan belanja langsung				Jumlah SPM yang diteliti						

PEREMENDAGRI 90/2019															
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENTJA PD														
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
					Jumlah pennebitan Surat Pemindah Pencarian Dana (SPD)	11000	Surat	Penyusunan, Pennebitan dan Pendistribusian Lembar SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pennebitan SPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 04
					Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	611	Surat	Pelaksanaan Pengendalian dan Pennebitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pennebitan SPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 2 2 10
					Jumlah Juknis dan Sidur yang disusun	1	Kali	Penyusunan Petunjuk Teknis, Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Pennebitan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Juknis dan Sidur yang disusun	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyusunan Juknis dan Sidur	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 2 2 09
					Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100 %									
					Jumlah Hasil Penilaian BMD yang dicatat	2	Laporan	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD yang dicatat	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 03
					Jumlah laporan Hasil Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat	5	Laporan	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5 02 03 2.0 06
					Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	4	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi yang dilaksanakan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5 02 03 2.0 11
					Jumlah laporan BMD yang disusun dan ditimpun	3	Laporan		Jumlah Bimtek Pengelolaan BMD yang dilaksanakan						
					Jumlah updating database BMD yang dihasilkan	1	Kali	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah laporan BMD yang ditimpun dan disusun	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5 2 03 2.0 12
					Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD	47	Laporan	Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5 02 03 2.0 03
					Jumlah Laporan OPD yang menyampaikan rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan BMD	47	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang menyampaikan Rencana Pemeliharaan / Perawatan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Rencana Pemeliharaan / Perawatan BMD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5 02 03 2.0 04

STRUKTUR ORGANISASI	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	
					Jumlah laporan SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	47 Laporan											
					Jumlah dokumen pengajuan usulan pemrintasan BMD yang dilaksanakan	2 Dokumen											
Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan BMD	4.02.4.02.01.2 0.006			Kegiatan Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan	4 Laporan	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan, Frik Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan /	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELCILAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib			5 02 03 2.0 1	
					Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan	2 Dokumen			Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan								
					Jumlah dokumen usulan pemindahhtanganan yang dilaksanakan	5 Dokumen	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahhtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan pemindahhtanganan yang dilaksanakan /	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen usulan pemindahhtanganan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENGELCILAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib				5 02 03 2.0 1
					Jumlah dokumen usulan Penghapusan yang dilaksanakan	30 Dokumen	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan Penghapusan yang dilaksanakan	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase dokumen usulan Penghapusan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENGELCILAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib				5 02 03 2.0 09 1
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	4.02.4.02.01.2 1			PROGRAM PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan, Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kategori Baik	100 %											
Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	4.02.4.02.01.2 1.001			Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data pendapatan daerah yang akurat	281 Kali	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Perda tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		Persentase penyusunan Perda/perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELCILAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, kategori Baik				5 02 04 2.0 2
					Jumlah dokumen nasihat akademik	1 Dokumen			Jumlah Perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah								
					Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah	1 Dokumen	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan, Tinjau Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah	Perencanaan dan Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah		Persentase dokumen potensi pendapatan daerah yang disusun	PROGRAM PENGELCILAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, kategori Baik				5 02 04 2.0 2
					Jumlah dokumen integrasi dengan pihak ketiga	3 Dokumen	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		Persentase Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELCILAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, kategori Baik				5 02 04 2.0 2
Sub Bidang Pemetaan Pajak Daerah	4.02.4.02.01.2 1.002			Fasilitas penetapan pajak daerah yang ditetapkan	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan	6600 WP	Perumusan Kebijakan Strategi Penulisan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		Persentase Sosialisasi Pajak Daerah	PROGRAM PENGELCILAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, kategori Baik				5 02 04 2.0 2

PEMENDAGRI 90/2019														
STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENUA PD													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	URUSAN	KODE
					Jumlah Surat keberatan, pengurangan dan banding yang diterbitkan	1 Surat								
Sub Bidang Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	4.02.4.02.01.2 2.002			Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang disusun akurat dan tepat waktu	12 Laporan	Laporan	Penyenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	Perencanaan, Pengumpulan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5 02 04 2.0 08 2
					Jumlah laporan realisasi pendapatan dan perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu	12 Laporan	Laporan							
					Jumlah laporan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun akurat dan tepat waktu	12 Laporan	Laporan							
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	4.02.4.02.01.2 2.003			Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan	19 Kali	Kali	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penerimaan sesuai dengan pola operasional	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase laporan penerimaan sesuai dengan pola operasional	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5 02 04 2.0 11 2
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	4.02.4.02.01.2 3			PROGRAM MANAJEMEN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang Disusun Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu	100 %								
Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Regulasi	4.02.4.02.01.2 3.001			Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	Jumlah SK Bupati tentang Standar Satuan Harga	1 SK	SK	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Pembinaan Penyusunan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang memidaiakikuti hasil Pembinaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		5 02 02 2.0 09 1
					Jumlah Standarisasi Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja pada masing2 kegiatan	1 SK	SK		Jumlah Koordinasi dengan SKPD					
					Jumlah Simbingan Teknis Admin E-Budgeting	1 Kali	Kali	Pelaksanaan Prujaman Pada Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Prujaman Pada Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		5 02 02 2.0 01 4
					Jumlah Pembinaan Teknis Pembinaan SKPD	2 Kali	Kali							
					Jumlah Sosialisasi Regulasi Penyusunan APBD dan PABPD	2 Kali	Kali							
					Jumlah Pendampingan Aplikasi e-budgeting	2 Kali	Kali							
Sub Bidang Penyusunan dan Penetapan Anggaran	4.02.4.02.01.2 3.002			Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	Jumlah dokumen Perda APBD dan PABPD yang disusun	2 Perda	Perda	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD yang disusun tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		5 02 02 2.0 07 1

PERMENDAGRI 90/2019															
RENSTRA/RENUA PD															
STRUKTUR ORGANISASI	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
					Jumlah dokumen perbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang disusun	2 Perbup		Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Regulasi yang disusun tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 08 1
								Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Jumlah Pembinaan Penyusunan APBD	Kegiatan Penunjang Urusan	Persentase Regulasi yang disusun tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 02 4
	4.02.4.02.01.2			Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah RIN	Jumlah Dokumen Ranperda APBD dan PAPBD yang tersusun	2 Ranperda		Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Regulasi Penyusunan APBD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Regulasi yang disusun tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 05 1
					Jumlah Dokumen Ranperbup Penjabaran APBD dan PAPBD yang Tersusun	2 Ranperbup			Jumlah Regulasi Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu						
								Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Regulasi Penyusunan APBD tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Regulasi yang disusun tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 06 1
									Jumlah Regulasi Penyusunan Perubahan APBD tepat waktu						
								Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 02 1
								Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 03 1
								Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu				5 02 02 2.0 04 1
	4.02.4.02.01.2			PROGRAM MAJALHEMEN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Managemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Dilusun Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100 %						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02
					Jumlah laporan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan SKPD	12 kali		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 01 3
	4.02.4.02.01.2			Kegiatan Fasilitas, Rekonstruksi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	Jumlah Rekonstruksi atas realisasi Penerimaan dengan SKPD non B/LUD, B/LUD dan PPRD	180 kali		Rekonstruksi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	Jumlah pelaksanaan Rekonstruksi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan Rekonstruksi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 07 3

STRUKTUR ORGANISASI	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
					Jumlah konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD	180 kali									
					Jumlah laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	285 Laporan									
					Jumlah evaluasi laporan realisasi penerimaan	180 Kali									
					Jumlah Verifikasi, analisa, dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan	12 Kali		Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 11 3
					Jumlah pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	2 Kali									
					Jumlah Regulasi tte Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan	2 Dokumen		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 10 3
Sub bidang akuntansi pengeluaran	4.02.4.02.01.2 4.002				Kegiatan Fasilitas Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	564 Kali		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase jumlah pelaksanaan koordinasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 01 3
					Jumlah konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya	12 Kali									
					Jumlah khtisar laporan keuangan BUND	12 Laporan									
					Jumlah Rekonsiliasi atas realisasi Pengeluaran dengan SKPD	564 kali		Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Rekonsiliasi yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2.0 07 3
					Jumlah konsolidasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD, dan PPKD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	1368 laporan									
					Jumlah evaluasi laporan realisasi pengeluaran	12 Kali									

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
				Jumlah verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran	1368 Laporan	Laporan	Verifikasi dan Pengujian atas Budi Memorial	Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Budi Memorial yang dilakukan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengujian atas Budi Memorial yang dilakukan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 11
				Jumlah pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	2 Kali	Kali	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 12
				Jumlah Regulasi tte Akuntansi Pengeluaran yang dihasilkan	2 Dokumen	Dokumen	Penyusunan, Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional yang disusun	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 09
4.02.4.02.01.2 4.003	Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban		Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	Jumlah kebijakan & Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah	6 Dokumen	Dokumen	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil Koordinasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 02
				Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	47 Laporan	Laporan								
				Jumlah mapping laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	47 Laporan	Laporan								
4.02.4.02.01.2 4.004	Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban		Kegiatan Penyusunan cerpena dan cerperub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda & Ranperub tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu	2 Dokumen	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil Koordinasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 04
				Jumlah Pelaksanaan Bimtek tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Kali	Kali								
				Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD Realiam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300 Laporan	Laporan	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase konsolidasi yang dilaksanakan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5 02 02 2,0 05
				Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD	300 Laporan	Laporan								
				Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi atau laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Laporan	Laporan								

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD										PERMENDAGRI 90/2019					
	KODE	URLUSAN	BIDANG URLUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URLUSAN	URLUSAN	KODE
					Jumlah Ihtisar Kinerja Keuangan Daerah yang disusun	12 Dokumen	Penyusunan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Pelaksanaan APBD yang disusun	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dolumen Analisis yang disusun	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu				5 02 02 2,0 08 3
					Jumlah Verifikasi dan Penjualan atas memorial transaksi non kas	47 Kali										
					Jumlah Pembinaan, Sosialisasi Tertiang Penyusunan keuangan Daerah sesuai SAP	47 Kali										

Ngawi, 2020
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN NGAWI

